

Tabel 4. Poin-poin Perubahan Peraturan Bupati terkait Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2023 dan 2024

No	Poin perubahan	
	Perbup Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2023	Perbup Pedoman Penyusunan APBDes tahun 2024
1	Poin sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa tahun 2023 Isu-isu pembangunan sektoral di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023	Poin sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa disesuaikan dengan tahun 2024 Isu-isu pembangunan sektoral di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024
2	RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.	RPJMDesa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
3	Standar Harga untuk honorarium sistem informasi unruk perangkat desa	Tidak ada honorarium sistem informasi untuk perangkat desa
4	Alokasi pendapatan transfer khusus untuk Dana Desa, BHP, BHR, ADD, berpedoman pada alokasi anggaran tahun sebelumnya	Dalam hal terdapat SILPA dari pengalokasian dana BHP dan BHR tahun sebelumnya, maka penggunaan di tahun berjalan tetap diprioritaskan untuk optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5	Belum ada penganggaran PBB aset desa dan Tanah Kas Desa	Adanya penganggaran PBB aset desa dan Tanah Kas Desa

Sumber: Diolah dari Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo (2025)